Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis
Volume. 4, Nomor. 2 Mei 2025
e-ISSN: 2808-8980; p-ISSN: 2808-9383, Hal 260-271
DOI: https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4115
Available online at : https://journalcenter.org/index.php/jupsim

Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mengatasi Eksternalitas, Barang Publik, Redistribusi Pendapatan, dan Penerapan Pajak Progresi

Awaliah Arisyah[1*], Hendra Riofita[2]
[1-2]Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail : awaliaharisyah50@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No. Km. 15, RW. 15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 2893
Korespondensi penulis: awaliaharisyah50@gmail.com[*]

Abstract. *Public economic policy plays a crucial role in balancing market efficiency and social justice. This article aims to analyze how optimizing public policy can address major challenges such as negative externalities, limitations in public goods provision, income inequality, and unfair taxation systems. This study employs a qualitative approach through literature review focusing on recent academic works. The findings suggest that data-driven and holistic economic public policies can significantly contribute to enhancing social welfare and promoting inclusive economic growth. Strengthening implementation and fostering cross-sector collaboration are essential to ensure more targeted and sustainable policy outcomes.*

Keywords*: Externalities, Income Redistribution, Progressive Tax, Public Economic Policy, Public Goods.*

Abstrak. Kebijakan ekonomi publik memainkan peran penting dalam menyeimbangkan efisiensi pasar dan keadilan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi kebijakan publik dapat menjadi solusi atas tantangan utama seperti eksternalitas negatif, keterbatasan dalam penyediaan barang publik, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakadilan dalam sistem pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang berfokus pada karya-karya ilmiah terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi publik yang dirancang secara holistik dan berbasis data dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perlu adanya penguatan implementasi dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan ekonomi publik, eksternalitas, barang publik, redistribusi pendapatan, pajak progresif

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan ekonomi publik merupakan pilar fundamental dalam arsitektur ekonomi suatu negara, yang bertujuan tidak hanya untuk menciptakan efisiensi pasar, tetapi juga untuk menjamin keadilan sosial di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. Dalam praktiknya, pasar tidak selalu bekerja secara sempurna. Kegagalan pasar (market failure) sering kali muncul dalam berbagai bentuk, seperti eksternalitas negatif, keterbatasan penyediaan barang publik, ketimpangan distribusi pendapatan, dan sistem perpajakan yang kurang adil. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi apabila tidak ditangani dengan pendekatan kebijakan yang tepat.

Salah satu isu utama dalam ekonomi publik adalah eksternalitas, baik positif maupun negatif, yang terjadi ketika konsekuensi dari suatu aktivitas ekonomi memengaruhi pihak ketiga tanpa adanya kompensasi. Misalnya, pencemaran udara dari

Received: Mei 01, 2025; Revised: Mei 15, 2025; Accepted: Mei 29, 2025; Published: Mei 31, 2025

industri menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas, sementara manfaat dari pendidikan melampaui kepentingan individu yang mengaksesnya. Tanpa intervensi pemerintah, pasar cenderung mengabaikan dampak-dampak ini, yang berujung pada distribusi sumber daya yang tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen kebijakan seperti pajak pigovian dan subsidi untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut (Riofita, 2023, hlm. 147).

Selain itu, penyediaan barang publik seperti jalan raya, pertahanan nasional, dan pencahayaan jalan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar karena karakteristiknya yang non-rival dan non-excludable. Sektor swasta cenderung menghindari penyediaan barang-barang tersebut karena tidak menguntungkan secara komersial. Dalam hal ini, negara harus mengambil peran sebagai penyedia utama demi menjamin akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Riofita, 2023, hlm. 149).

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi publik. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu ketegangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Oleh karena itu, negara perlu melakukan intervensi melalui kebijakan redistributif, seperti bantuan sosial, subsidi, dan program jaminan sosial yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Redistribusi yang efektif tidak hanya memperbaiki keadilan sosial, tetapi juga memperluas daya beli masyarakat dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional (Riofita, 2023, hlm. 672).

Di sisi lain, sistem perpajakan juga menjadi isu penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang adil. Pajak progresif menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Namun, dalam implementasinya, sistem perpajakan sering kali menghadapi tantangan berupa ketidakpatuhan, basis data yang lemah, dan kebocoran pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pajak yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas serta kepercayaan masyarakat (Riofita, 2025, hlm. 15).

Dalam konteks inilah, peran pemerintah sebagai agen koreksi atas kegagalan pasar menjadi sangat vital. Pemerintah tidak hanya bertugas merancang kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan adil. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap mekanisme ekonomi publik dan perbaikan berkelanjutan terhadap instrumen kebijakan menjadi suatu keniscayaan. Kebijakan ekonomi publik yang tidak hanya responsif terhadap kondisi pasar, tetapi juga

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, akan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan (Riofita, 2023, hlm. 671).

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan ekonomi publik dibentuk berdasarkan prinsip untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang merata. Kajian teoritis ini akan membahas empat aspek utama: eksternalitas dan intervensi pemerintah, penyediaan barang publik, redistribusi pendapatan, serta pajak progresif.

Eksternalitas dan Intervensi Pemerintah

Eksternalitas adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu pihak memberikan dampak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi. Eksternalitas dapat bersifat negatif, seperti pencemaran lingkungan, maupun positif, seperti manfaat dari vaksinasi massal. Dalam pasar bebas, eksternalitas sering kali diabaikan karena pelaku ekonomi hanya mempertimbangkan biaya privat, bukan biaya sosial. Hal ini mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya (Riofita, 2023, hlm. 147).

Untuk mengatasi hal tersebut, teori ekonomi publik menganjurkan intervensi pemerintah melalui instrumen seperti pajak pigovian untuk eksternalitas negatif dan subsidi untuk eksternalitas positif. Pajak pigovian membebankan biaya pada pelaku yang menimbulkan dampak negatif agar harga barang atau jasa mencerminkan biaya sosialnya. Sebaliknya, subsidi mendorong aktivitas yang berdampak positif agar pelaku lebih termotivasi melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, intervensi pemerintah menjadi alat korektif terhadap kegagalan pasar dalam menangani eksternalitas.

Penyediaan Barang Publik

Barang publik memiliki dua karakteristik utama: non-rivalry (konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan bagi individu lain) dan non-excludability (tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari konsumsinya). Contoh barang publik antara lain pertahanan nasional, penerangan jalan, dan kebersihan udara. Karena sifat ini, sektor swasta umumnya tidak tertarik menyediakannya karena sulit memperoleh keuntungan langsung.

Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjadi penyedia utama barang publik guna menjamin akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Tanpa keterlibatan pemerintah, akan terjadi underprovision, yaitu penyediaan barang publik

dalam jumlah yang lebih rendah dari kebutuhan masyarakat (Riofita, 2023, hlm. 149). Pemerintah dapat membiayai barang publik melalui pajak yang dikumpulkan dari masyarakat secara luas, yang kemudian digunakan untuk pembiayaan layanan dan infrastruktur bersama.

Redistribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan persoalan struktural yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketika jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, produktivitas nasional dapat terganggu, kepercayaan terhadap institusi melemah, dan muncul potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan redistribusi untuk menjamin keadilan distributif.

Kebijakan fiskal seperti pajak, serta program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan, bantuan tunai, dan pendidikan gratis, menjadi alat utama dalam strategi redistribusi pendapatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan sebagian sumber daya dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok yang lebih rentan secara ekonomi, sehingga meningkatkan pemerataan kesejahteraan (Riofita, 2023, hlm. 671). Redistribusi yang dirancang secara tepat sasaran juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan dengan memperluas daya beli masyarakat.

Pajak Progresif

Pajak progresif adalah sistem perpajakan yang membebankan tarif pajak lebih tinggi pada individu atau rumah tangga dengan pendapatan yang lebih besar. Sistem ini dilandasi oleh prinsip keadilan vertikal, yaitu bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya menanggung beban fiskal yang lebih besar. Pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga sebagai alat pengurang ketimpangan (Riofita, 2025, hlm. 13).

Dalam teori ekonomi publik, pajak progresif mencerminkan tanggung jawab sosial individu terhadap komunitas. Ketika diimplementasikan secara efektif, sistem ini mampu mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil tanpa mengurangi insentif kerja dan investasi. Namun demikian, tantangan dalam sistem pajak progresif antara lain adalah praktik penghindaran pajak, keterbatasan data wajib pajak, serta resistensi dari kelompok ekonomi kuat. Maka dari itu, reformasi perpajakan harus diiringi dengan transparansi, digitalisasi sistem perpajakan, dan edukasi publik mengenai pentingnya kontribusi fiskal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep teoretis dan implementatif yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi publik. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang kredibel guna membangun pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu ekonomi publik, seperti eksternalitas, barang publik, redistribusi pendapatan, dan pajak progresif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Peneliti secara khusus mengkaji karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Hendra Riofita dan rekan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus kebijakan ekonomi dan manajemen publik di era kontemporer. Salah satu rujukan utama adalah karya Riofita dalam *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (2023) dan *Inovasi Pendidikan Nusantara* (2025), yang memberikan landasan konseptual dalam memahami peran negara dalam mengatur alokasi sumber daya dan mewujudkan keadilan sosial (Riofita, 2023, hlm. 671; Riofita, 2025, hlm. 13).

Teknik analisis data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sintesis terhadap berbagai argumen dan temuan dalam literatur yang dikaji. Gagasan-gagasan utama kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan aktual yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi publik. Proses analisis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan interpretatif terhadap dinamika kebijakan publik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif-deskriptif dalam studi pustaka ini menjadi sarana untuk memetakan gagasan konseptual dan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplik atif serta relevan dengan tantangan kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif. Contoh eksternalitas negatif adalah Kebijakan ekonomi publik memiliki peran vital dalam mengarahkan jalannya perekonomian negara agar tidak semata-mata mengedepankan efisiensi, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan sosial. Pasar yang bekerja tanpa intervensi pemerintah sering kali menghasilkan ketimpangan, kegagalan distribusi, dan berbagai bentuk

eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, negara sebagai aktor utama dalam kebijakan publik perlu hadir dengan instrumen yang tepat, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian pustaka, terdapat empat pilar utama dalam kebijakan ekonomi publik yang perlu mendapat perhatian khusus: pengelolaan eksternalitas, penyediaan barang publik, redistribusi pendapatan, dan penerapan sistem pajak progresif.

Pengelolaan Eksternalitas: Pajak Pigovian dan Subsidi sebagai Instrumen Korektif

Eksternalitas terjadi ketika aktivitas ekonomi suatu pihak berdampak pada pihak lain tanpa melalui mekanisme hargapolusi udara dari pabrik industri yang merugikan masyarakat sekitar tanpa kompensasi, sedangkan contoh eksternalitas positif adalah individu yang menanam pohon dan memberikan manfaat lingkungan bagi sekitarnya.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengoreksi kegagalan pasar ini melalui instrumen fiskal, salah satunya adalah pajak Pigovian. Pajak ini bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal yang tidak tercermin dalam harga pasar. Misalnya, pajak karbon diberlakukan untuk mendorong pelaku industri mengurangi emisi karbon, sehingga mereka mempertimbangkan biaya sosial dari aktivitas produksinya (Riofita, 2023, hlm. 146).

Namun, efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaannya. Pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing industri, sementara pajak yang terlalu rendah tidak memberikan insentif perubahan perilaku. Oleh karena itu, penetapan tarif harus melalui kajian akademik dan konsultasi publik agar menghasilkan kebijakan yang berkeadilan.

Selain pajak, pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk kegiatan yang memiliki eksternalitas positif seperti riset dan pengembangan (R&D), pendidikan, dan vaksinasi. Namun demikian, pemberian subsidi pun harus disertai dengan sistem akuntabilitas dan evaluasi berkelanjutan agar tidak disalahgunakan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mengelola eksternalitas masih mengalami tantangan dalam hal data, pengawasan, dan koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kelembagaan serta penguatan kapasitas birokrasi fiskal untuk mendukung penerapan instrumen yang lebih efektif dan efisien.

Penyediaan Barang Publik: Pemerataan Layanan Dasar dan Pembangunan Berbasis Kebutuhan

Barang publik memiliki dua karakteristik utama: non-rival (konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi konsumsi oleh individu lain) dan non-excludable (tidak ada pihak yang bisa dikecualikan dari konsumsi barang tersebut). Karena sifat ini, sektor swasta cenderung enggan menyediakan barang publik karena tidak menghasilkan keuntungan langsung. Oleh sebab itu, negara berperan penting dalam penyediaan barang publik seperti jalan umum, pertahanan negara, keamanan, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan.

Menurut Riofita (2023, hlm. 149), penyediaan barang publik harus berbasis peta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan data spasial, sosial, dan ekonomi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Misalnya, daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan dasar dan akses jalan layak harus mendapat perhatian utama dalam alokasi APBN. Dengan begitu, pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan wilayah dapat dikurangi.

Pendidikan dan infrastruktur merupakan dua sektor strategis yang memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan berkualitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membuka peluang mobilitas sosial, sementara infrastruktur mendorong konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik.

Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah inkonsistensi perencanaan, minimnya koordinasi antar-daerah dan kementerian, serta lemahnya sistem pengawasan proyek publik. Akibatnya, penyediaan barang publik sering kali tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (participatory planning), dan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan real-time proyek barang publik.

Redistribusi Pendapatan: Menjembatani Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan merupakan masalah struktural yang tidak bisa diatasi hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi menjadi penting untuk menjamin pemerataan hasil pembangunan. Redistribusi pendapatan mencakup berbagai instrumen, mulai dari bantuan sosial, subsidi, hingga reformasi kepemilikan aset.

Bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin sekaligus mendorong perilaku produktif seperti menyekolahkan anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Namun, efektivitas bantuan sosial sangat tergantung pada ketepatan sasaran. Berdasarkan kajian Riofita (2023, hlm. 672), banyak program sosial menghadapi masalah data yang usang, tumpang tindih antarprogram, dan rendahnya kapasitas pengelolaan.

Integrasi data sosial melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi langkah penting untuk menjamin akurasi penerima manfaat. Selain itu, peningkatan literasi digital dan sistem informasi sosial berbasis desa juga mendukung akuntabilitas dan transparansi distribusi bantuan.

Di sisi lain, subsidi energi yang selama ini menyedot anggaran besar perlu direformasi agar lebih tepat sasaran. Subsidi listrik dan BBM, jika tidak diarahkan pada kelompok miskin, berpotensi menguntungkan kelompok menengah ke atas dan menciptakan ketimpangan baru.

Lebih jauh lagi, redistribusi pendapatan juga bisa dilakukan melalui akses terhadap aset produktif seperti tanah, pendidikan tinggi, pelatihan kerja, dan modal usaha. Intervensi semacam ini tidak hanya menolong kelompok rentan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Di sinilah pentingnya pendekatan redistributif yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan semata-mata pada konsumsi.

Pajak Progresif: Pilar Keadilan Fiskal dan Tantangan Implementasi

Sistem perpajakan progresif adalah sistem di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan keadilan fiskal dengan membebankan beban pajak lebih besar pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Secara teori, pajak progresif tidak hanya menjadi sumber pendanaan negara, tetapi juga alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Namun, menurut Riofita (2025, hlm. 15), pelaksanaan pajak progresif di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Basis data wajib pajak yang belum optimal menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak tergali. Banyak individu dan entitas dengan penghasilan besar masih berada di luar jangkauan sistem perpajakan, terutama dari sektor informal dan ekonomi digital.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan pajak masih rendah, terutama karena persepsi negatif terhadap transparansi penggunaan pajak. Kurangnya sosialisasi dan edukasi fiskal juga memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus diarahkan pada tiga hal:

a. Penguatan basis data pajak dan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan cakupan dan efisiensi pemungutan pajak.
b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, agar masyarakat melihat bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
c. Pendidikan dan literasi fiskal kepada masyarakat, agar pajak tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi bersama dalam membangun negara.

Selain itu, reformasi juga harus mencakup penyederhanaan sistem pajak, peningkatan kapasitas aparatur perpajakan, dan pemberlakuan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak. Dengan begitu, sistem perpajakan progresif dapat berfungsi secara optimal sebagai alat redistribusi dan pembiayaan pembangunan nasional.

Sinergi Antar-Instrumen Kebijakan dan Implikasi Jangka Panjang

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah perlunya sinergi antar-instrumen kebijakan ekonomi publik. Kebijakan pengelolaan eksternalitas tidak dapat dipisahkan dari kebijakan fiskal secara umum. Penyediaan barang publik harus didukung oleh penerimaan negara yang stabil dan adil. Redistribusi pendapatan perlu ditopang oleh sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

Lebih jauh lagi, kebijakan-kebijakan tersebut harus berlandaskan pada data yang valid, evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy), dan partisipasi publik yang luas. Peran teknologi dalam perumusan kebijakan juga menjadi krusial, terutama dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara real time.

Dalam jangka panjang, negara yang mampu mengelola eksternalitas dengan tepat, menyediakan barang publik secara merata, meredistribusikan pendapatan secara adil, dan menerapkan sistem perpajakan progresif yang transparan, akan memiliki daya tahan sosial dan ekonomi yang kuat. Negara seperti itu mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, antara efisiensi dan inklusivitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi publik memegang peranan strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Berdasarkan hasil kajian, terdapat empat dimensi utama yang perlu terus dioptimalkan agar kebijakan publik benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan ketimpangan dan kegagalan pasar.

Pertama, pengelolaan eksternalitas melalui instrumen fiskal seperti pajak Pigovian dan subsidi terbukti dapat menginternalisasi biaya sosial dan mendorong perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada desain kebijakan dan pengawasan yang kuat.

Kedua, penyediaan barang publik harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya berdasarkan target makro atau politis. Pemanfaatan data spasial dan sistem penganggaran berbasis kinerja dapat mendorong efisiensi dan pemerataan pembangunan.

Ketiga, redistribusi pendapatan tetap menjadi agenda utama dalam menjaga kohesi sosial dan keadilan ekonomi. Ketepatan sasaran bantuan sosial, integrasi data kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Keempat, sistem pajak progresif berpotensi besar dalam menciptakan keadilan fiskal, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti rendahnya basis data dan kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan.

Secara umum, optimalisasi kebijakan ekonomi publik membutuhkan sinergi antar-sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Saran

a) Pemerintah perlu memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan kebijakan fiskal dengan berbasis pada evidence-based policy serta pendekatan partisipatif agar kebijakan yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
b) Pengembangan data terintegrasi antarlembaga perlu menjadi prioritas utama, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan basis data perpajakan. Kolaborasi antara Bappenas, Kemenkeu, Kemensos, dan BPS sangat penting dalam hal ini.

c) Peningkatan literasi publik terkait ekonomi dan pajak harus digalakkan melalui kurikulum pendidikan, media massa, serta program sosialisasi berbasis komunitas, guna meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi terhadap pembangunan nasional.
d) Penguatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik harus dilakukan melalui sistem pelaporan digital dan keterlibatan lembaga pengawas independen, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi fiskal negara.
e) Reformasi kebijakan subsidi dan bantuan sosial perlu diarahkan pada pemberdayaan jangka panjang, bukan hanya sebagai instrumen konsumsi. Program pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan jaminan sosial produktif dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan.
f) Sinergi antara kebijakan ekonomi publik dengan agenda pembangunan berkelanjutan harus ditekankan, terutama dalam aspek pengurangan ketimpangan, pekerjaan layak, dan pembangunan infrastruktur.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan ekonomi publik dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

Hadiati, E., Suroya, A., Ningsih, I., Wahyuni, S., & Yuliaputri, T. (2025). Memahami perencanaan sumber daya manusia: Strategi, implementasi, dan dampak. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, *6*(1).

Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Helmi, A., Pratama, A. Y., Azizah, M., Setya, P. D., & Riofita, H. (2023). Tinjauan strategi terkini dalam manajemen sumber daya manusia: Inovasi dan tantangan di era digital. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *1*(5), 668–680.

Meisella, A., Irawati, D., Balqis, K. A., Ama, S., & Riofita, H. (2023). Peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, *2*(11), 144–154.

Mulyasa, E. (2018). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H. (2015). *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Riofita, H. (2017). Pengaruh motivasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Prosidin Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, *3*(1).

Riofita, H. (2022). Mengembangkan program pemberdayaan digital untuk meningkatkan kinerja pemasaran perguruan tinggi Islam swasta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Muslim*, *1*(2).

Riofita, H. (2024). Predicting Muslim female customer retention through Islamic marketplace attractiveness. *Jurnal Ekonomi Islam dan Digital*, *4*(2).

Sedarmayanti. (2019). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sopiah, & Sangadji, E. M. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Andi.

Sunyoto, D. (2021). *Dasar-dasar manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: CAPS.

Wirawan. (2020). *Manajemen sumber daya manusia Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.